

KATA PENGANTAR

HASRAT menggapai kemajuan ekonomi acapkali mempersyaratkan adanya berbagai kemudahan baru untuk memperlancar pelaksanaan transaksinya. Para pelaku ekonomi juga dihadapkan pada persaingan yang semakin ketat, baik secara domestik maupun internasional, sehingga harus mencari berbagai terobosan baru dalam bentuk inovasi mengenai produk, prosedur, maupun teknik kerja, agar tetap berada pada posisi yang kompetitif. Tidak terkecuali hal ini pun terjadi di kalangan perbankan.

Bank dan lembaga keuangan lainnya sudah melekat dalam kehidupan masyarakat modern. Sistem bank dapat diibaratkan sebagai sistem urat nadi dalam tubuh manusia dengan bank sentral sebagai jantungnya dan uang sebagai darah yang menghidupi kegiatan ekonomi. Dunia bisnis mendambakan penawaran uang yang elastis berhadapan dengan permintaan uang yang berfluktuasi sesuai dengan denyut kehidupan ekonomi.

Setelah merdeka, Indonesia harus segera menata lembaga keuangannya untuk menunjang dan memacu pembangunan nasional. Perkembangan yang dialami oleh sektor perbankan di Indonesia, khususnya sejak tahun 1970-an adalah hasil dari serangkaian kebijakan dan deregulasi, yang secara kronologis adalah sebagai berikut.

Kebijakan pada Pelita II: Dengan memperhatikan perkembangan dan kondisi ekonomi setelah berlangsungnya Pelita I, yang ditengarai banyak menimbulkan ketimpangan, mulai Pelita II prioritas kebijakan moneter ditujukan untuk membantu golongan ekonomi kecil dan menengah. Hal ini ditandai dengan diluncurkannya jenis perkreditan yang dikenal dengan sebutan KIK dan KMKP. Untuk mengendalikan ekspansi moneter, dikeluarkan kebijakan mengenai

pagu kredit dan suku bunga serta kredit likuiditas dari BI untuk sektor-sektor prioritas. Kebijakan ini telah membuat bank-bank pemerintah seakan-akan menjadi perpanjangan tangan birokrasi untuk menyalurkan kredit pemerintah. Dampaknya ialah bahwa bank-bank pemerintah kurang memperhatikan upaya menghimpun dana dari masyarakat. Kebijakan ini juga membawa akibat adanya ketimpangan antara bank-bank pemerintah dan bank swasta. Untuk mendorong kegairahan kegiatan perbankan, pemerintah menurunkan cadangan wajib minimum dari 30% menjadi 15%.

Deregulasi pada Pelita III, IV dan V: Proses deregulasi berjalan cukup panjang sampai menjelang krisis moneter dan ekonomi.

Pertama, Pakjun - 83, yaitu Paket Kebijakan Juni 1983. Paket ini merupakan proses awal liberalisasi perbankan dengan ditiadaknya ketentuan mengenai pagu kredit dan tingkat bunga, mendorong mobilisasi dana dari masyarakat serta mengurangi ketergantungan sistem perbankan pada kredit likuiditas BI. Sebagai kebijakan selanjutnya, BI mengintroduksi instrumen politik pasar terbuka, yang disebut SBI dan SBPU.

Kedua, Pakto - 88, yaitu Paket Kebijakan Oktober 1988. Paket ini merupakan deregulasi yang lebih mendasar, yang antara lain meliputi batas maksimum pemberian kredit, penghapusan hambatan pendirian bank dan penurunan yang drastis dari cadangan wajib minimum dari 15% menjadi 2%.

Ketiga, Pakdes - 88, yaitu Paket Kebijakan Desember 1988, yang bertujuan untuk mendorong perkembangan lembaga keuangan non-bank, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perdagangan surat berharga dan kartu kredit.

Keempat, Pakmar - 89, yaitu Paket Kebijakan Maret 1989, antara lain meliputi ketentuan mengenai merger, permodalan, pemilikan modal campuran, serta bidang usaha dan wilayah kerja BPR.

Kelima, Pakjan - 90, yaitu Paket Kebijakan Januari 1990, yang bertujuan untuk meningkatkan bantuan pada golongan ekonomi lemah dengan mewajibkan semua bank menyalurkan 20% dari kreditnya kepada pengusaha kecil (KUK).

Keenam, Pakri - 91, yaitu Paket Kebijakan Februari 1991, yang mencakup aspek perizinan, kepemilikan dan kepengurusan, pedoman

operasional atas dasar kehati-hatian manajemen, sistem pelaporan dan tata cara penilaian kesehatan bank. Hal ini dipandang semakin mendesak dan strategis karena kondisi perbankan yang kurang memuaskan, serta untuk menghadapi persaingan global. Modal minimum bank (CAR) ditentukan 8% sesuai dengan standar BIS.

Ketujuh, Paksep - 95, yaitu Paket Kebijakan September 1995, yang antara lain menentukan bahwa bank umum menjadi bank devisa. Semua paket kebijakan di atas sudah barang tentu disertai dengan ketentuan-ketentuan yang lebih operasional dari BI.

Serangkaian kebijakan dan deregulasi itu, secara kuantitatif telah meningkatkan jumlah dan cabang bank, jumlah dana yang dapat dihimpun, jumlah kredit yang diberikan, produk dan fasilitas yang diciptakan, baik oleh sistem perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank (LKBB). Sayang sekali hal ini kurang disertai dengan peningkatan kualitas, yang akhirnya menjadi beban berat Era Reformasi. Kelemahan aspek ini telah menjadi biang keladi kebobrokan sistem perbankan. Di antaranya 54 bank swasta nasional terpaksa dilikuidasi, 10 bank tergolong BBO, 12 bank berstatus BTO dan 9 bank direkapitalisasi (tidak termasuk bank milik pemerintah yang juga harus direkapitalisasi). Akibatnya hampir tidak terbayangkan: betapa besar dana yang harus disediakan oleh pemerintah, baik dana talangan maupun rekapitalisasi, yang *nota bene* adalah uang rakyat. Ini merupakan harga yang sangat mahal yang harus dibayar akibat kesalahan di masa lalu, dan semoga hal itu tidak terulang kembali.

Apa yang disajikan dalam tulisan ini merupakan perluasan dan pemutakhiran dari buku Pengantar Ekonomi Perbankan di Indonesia, yang pertama kali terbit pada tahun 1983. Substansinya tetap mengacu pada pokok bahasan mata kuliah Ekonomi Perbankan dengan bobot 2 SKS. Karena sifatnya sebagai pengantar, aspek analitis dibahas sangat terbatas. Kebijakan yang dijalankan oleh bank semestinya didasarkan atas analisis yang cermat, misalnya mengenai manajemen aset, manajemen modal, manajemen kewajiban, manajemen likuiditas, manajemen suku bunga, manajemen risiko, dan lain sebagainya. Hal ini biasanya hanya dilakukan oleh bank-bank besar di tingkat kantor pusatnya. Kebijakan bank-bank lain acapkali lebih

bertumpu pada peraturan-peraturan yang berlaku dan penilaian serta kebijakan bisnis direksinya.

Pola paparan tulisan ini mengacu pada buku ajar, karena sasaran pembacanya terutama adalah para mahasiswa, sehingga setiap bab terdiri atas: (1) tujuan pembelajaran; (2) konsep kunci; (3) materi sajian; (4) rangkuman; (5) soal untuk didiskusikan; (6) referensi. Sebagian besar referensi yang digunakan diharapkan telah tersedia di perpustakaan, dan sangat dianjurkan agar mahasiswa memperdalam serta memperluas wawasan dengan membaca referensi tersebut. Selain itu, mengingat perkembangan Ekonomi Perbankan sangat cepat, disarankan pula agar mahasiswa membaca sumber yang lebih mutakhir, misalnya jurnal, majalah dan harian.

Dengan tersedianya buku ajar ini, diharapkan penerapan metode pembelajaran secara mandiri (*self-directed learning*) menjadi lebih mantap. Metode ini mempersyaratkan agar mahasiswa menyusun rencana belajar sendiri (apa yang dipelajari, dari mana sumber diperoleh, kapan dan dengan siapa belajar). Kemudian memantau dan mengevaluasi hasil belajarnya (dengan bertanya kepada diri sendiri atau tanya jawab dengan sejawat, menilai ketepatan pilihan strategi belajar yang digunakan, dan sejauh mana hasil yang dicapai). Dalam proses belajar mengajar di kelas, setiap mahasiswa harus aktif dan partisipatif. Secara acak dan bergiliran mahasiswa diminta menyajikan hasil pembahasannya di depan kelas, sementara sejawat lainnya memberikan tanggapan dan komentar; sedangkan dosen lebih banyak berfungsi sebagai pengelola, fasilitator dan motivator.

Kritik dan saran untuk menyempurnakan buku ini penulis nantikan dengan ucapan terima kasih.

Singaraja, 17 Agustus 2000

Penyusun